

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA PEKALONGAN

**Drs. SOEROSO, M.Pd.**

Pembina Tingkat I

NIP.19640921 198803 1 007



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, saya dapat finishing tahun yang sudah biasa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, kewajiban yang lebih bertanggung jawab, bertanggung jawab dan mau lebih bertanggung jawab pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi, tujuan dan sasaran. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah dapat melaksanakan dan mengorganisir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.

Program Kerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan laporan tahunan Presiden RI 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lain-lain. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah laporan yang menggambarkan dan menilai kinerja dan seluruh kebijakan, program, kegiatan yang dilaksanakan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan termasuk di dalamnya yaitu kemampuan.

Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.

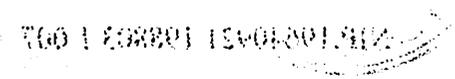
Pekanbaru, 2020

KATA BINA PENYIDIKAN

KATA PENGANTAR

Dr. SUDIRNO, M.Pd.

Kepala Dinas



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan ke pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016–2021. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 243.503.365.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.228.406.615.720,- (93,8%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 15 (Lima Belas) program dengan 96 (sembilan puluh enam) kegiatan.

Dinas Pendidikan sesuai dengan misi yang diemban dalam bidang pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain melalui penyediaan anggaran bantuan biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada setiap satuan pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan antara lain membiayai kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan bakat prestasi siswa serta pembenahan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran.

---



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan ke pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016–2021. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 243.503.365.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.228.406.615.720,- (93,8%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 15 (Lima Belas) program dengan 96 (sembilan puluh enam) kegiatan.

Dinas Pendidikan sesuai dengan misi yang diemban dalam bidang pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain melalui penyediaan anggaran bantuan biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada setiap satuan pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan antara lain membiayai kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan bakat prestasi siswa serta pembenahan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran.

---



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan lkeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran *serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.*

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi *daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada* lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan *sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

## 1.3 Gambaran Organisasi

### 1.3.1. Dasar Pembentukan

- a. pembinaan pengawasan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal;
- b. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal ataupun non formal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan;
- d. penyusunan pedoman, pelaksanaan, dan evaluasi kompetisi peserta didik, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional;
- e. pembinaan dan pengawasan kerjasama di bidang pendidikan;
- f. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah;
- g. pengawasan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- h. pengawasan dan pembinaan pelayanan perpustakaan sekolah dan Tempat Belajar Masyarakat (TBM);
- i. pengkoordinasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan;
- j. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pelap[oran pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- l. pengkordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- n. memimpin dan mengatur pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan;

- o. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan;
- p. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan;
- q. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pembinaan pendidikan dasar;
- r. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan dasar dan sarana prasarana kantor;
- s. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan pendidikan dasar;
- t. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan;
- u. Pengkoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan;
- v. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### 1.3.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1.) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2.) Sub Bagian Keuangan;
  - 3.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  - 1.)Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SD;
  - 2.)Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SMP;
  - 3.)Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, terdiri dari :

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 4).
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas perubahan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Perubahan atas peraturan Daerah Kota Pekalongan tahun 2016 – 2021

- 1.)Seksi Kurikulum dan Kelembagaan PAUD;
  - 2.)Seksi Kurikulum dan Kelembagaan PNF;
  - 3.)Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
- 1.)Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF;
  - 2.)Seksi Sarana dan Prasarana SD;
  - 3.)Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
- 1.)Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF;
  - 2.)Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
  - 3.)Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan terdiri atas:

- 1.) Jabatan Fungsional Pengawas SD;
- 2.) Jabatan Fungsional Pengawas SMP;
- 3.) Jabatan Fungsional Pengawas TK/PAUD;
- 4.) Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Non Formal
- 5.) Jabatan Fungsional Guru.

### 1.3.3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kota Pekalongan, Dinas Pendidikan Kota di dukung oleh 107 (Seratus tujuh) orang pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.3.1

## Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Kepala Seksi	12
6.	Pengawas SMP	3
7.	Pengawas SD	3
8.	Pengawas PAUD/TK	5
9.	Penilik	6
10.	Pranata Komputer	1
11.	Pelaksana PNS	39
12.	Pelaksana Non PNS	29
	<b>Jumlah</b>	<b>107</b>

Tabel 1.3.3.2

## Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I / IV.b	10
2.	Pembina / IV.a	16
3.	Penata Tingkat I / III.d	9
4.	Penata / III.c	9
5.	Penata Muda Tingkat I / III.b	10
6.	Penata Muda / III.a	8
7.	Pengatur Tingkat I / II.d	4
8.	Pengatur / II.c	7
9.	Pengatur Muda Tingkat I/II.b	4
10.	Pengatur Muda	1
	<b>Jumlah</b>	<b>78</b>

Tabel 1.3.3.3

## Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS
1.	S2	13	1
2.	S1	37	10
3.	D3	9	4
4.	D2	-	-
5.	D1	-	-
6.	SLTA	17	10
7.	SLTP	1	2
8.	SD	1	2
	Jumlah	78	29

Tabel 1.3.3.4

## Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Usia

NO.	Usia	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	56 tahun lebih	25	-	25
2.	51-55 tahun	20	1	21
3.	46-50 tahun	7	3	10
4.	41-45 tahun	10	1	11
5.	36-40 tahun	12	4	16
6.	31-35 tahun	3	7	10
7.	26-30 tahun	1	6	7
8.	18-25 tahun	0	7	7
	Jumlah	78	29	107

#### 1.3.4. Isu Strategis

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap

daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Pendidikan sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam masa tumbuh kembang anak;
2. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peningkatan akses layanan pendidikan dengan lebih memperhatikan pemerataan tingkat partisipasi sekolah;
4. Penambahan Unit Sekolah Baru dengan memperhatikan tingkat kebutuhan, rasio ketersediaan sekolah, dan pemerataan tingkat partisipasi sekolah;
5. Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan disertai upaya penyelenggaraan pendidikan yang lebih terjangkau;
6. Pengembangan pendidikan ketrampilan disertai dengan penumbuhan jiwa kewirausahaan kreatif;
7. Peningkatan kualitas pendidikan budi pekerti didukung tata kehidupan masyarakat sekolah yang berakhlak mulia.
8. Peningkatan akses layanan pendidikan melalui pemberian beasiswa;
9. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan potensi yang dimiliki serta menyelaraskan dengan kebutuhan pasar;
10. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri ( DU/DI );
11. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru minimal S1/D4 dan linear dengan bidang tugasnya, khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI;
12. Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan Mutu Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan;

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019 meliputi :

**BAB I    PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisi Landasan Hukum, Tugas dan Fungsi Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II    PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini berisi Rencana Strategis, Target IKU dan Perjanjian Kinerja

**BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV    PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 050/A.2/2308.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas

Pendidikan Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **2.2. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah Kota Pekalongan sebagai berikut :

### **a. Tujuan**

Tujuan dari Dinas Pendidikan adalah :

1. Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan yang merata
2. 1. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang bermutu  
2. Meningkatkan implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

### **b. Sasaran**

Sasaran dari Dinas Pendidikan adalah :

1. Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal)
3. Meningkatnya Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Sekolah
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 09/ M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan :

Tabel 2.3.1

Tabel IKU Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019

NO	INDIKATOR	RUMUS	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Sasaran 1 : Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)</i>								
1	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	Jumlah Peserta Didik Jenjang PAUD dibagi jumlah Penduduk usia 3-6 tahun			62,50	65,00 %	67,50%	70,00%
2	Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	Jumlah Peserta Didik Jenjang Dikdas dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun			100	100%	100%	100%
<i>Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (Dasar, anak usia dini dan PNF)</i>								
1	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	Jumlah satuan pendidikan jenjang dikdas yang berakreditasi A dibagi Jumlah satuan pendidikan jenjang dikdas kali 100%			70,00	75,00 %	80,00%	85,00%
2	Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD yang berakreditasi A dibagi Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD kali 100%			2,50	3,50%	4,50%	5,50%
<i>Sasaran 3 : Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah</i>								

NO	INDIKATOR	RUMUS	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
1	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Jumlah siswa SD dan SMP Negeri yang mendapat pendidikan keagamaan sesuai dengan agamanya			100%	100%	100%	100%
2	Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dibagi jumlah seluruh sekolah			5%	10%	20%	30%
3	Angka kenakalan pelajar	Jumlah siswa Jenjang Dikdas yang terlibat Kasus Kenakalan Pelajar per seratus siswa jenjang Dikdas			5	4	3	2
<i>Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja</i>								
4	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N		66,67	70,61	72,5	75	77,5
<i>Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>								
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	600	700	800	800	850	900

#### 2.4. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberi amanah/ tanggungjawab. Dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Manfaat dari Perjanjian Kinerja bagi pimpinan instansi adalah memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tahun 2019 terdapat 5 (Lima) sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Target yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019. Berikut adalah Perjanjian Kinerja di bidang pendidikan Tahun 2019 dengan uraian sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	65,00%
		Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	100,00%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	75,00%
		Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	3,50%
3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	100%
		Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	10%
		Angka kenakalan pelajar	4
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	72,5
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	800

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Pendidikan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

**Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.**

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel Predikat nilai capaian kerjanya**

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kerjanya untuk realisasi capaian kerjanya yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2 Predikat capaian Kinerja**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator 11 Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2.1  
Capaian IKU Dinas Pendidikan Kota Pekalongan  
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ targer akhir rpjmd)
1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan DASAR)	Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK	65,00 %	69,64%	107,13%	70,00%	99,48%

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ targer akhir rpjmd)
		Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas	100,00 %	100,81%	100,81%	100,00 %	100,81%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	75,00 %	68,45%	91,26%	85,00%	80,53%
		Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	3,50%	9,09%	259,71%	5,50%	165,27%
3	Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	10%	67,34%	673,4%	30%	224,47%
		Angka kenakalan pelajar	4	NA	NA	2	NA
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	72,61	100,15%	77,5	93,69%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	800	1000	125%	900	111,11%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ada yang melebihi target, sama dengan target dan kurang/ tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebanyak 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama yaitu Angka Partisipasi sekolah jenjang PAUD/ TK, Indikator Kinerja Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas, Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah, indikator Persentase Penyelenggaraan

PAUD berakreditasi A, Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Indikator Nilai Evaluasi AKIP capaian kinerjanya melebihi target.

- b. Capaian Indikator kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase implementasi pendidikankeagamaan di sekolah.
- c. Capaian Indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Berakreditasi A.
- d. Capaian yang tidak bisa disajikan datanya ditunjukkan untuk indikator Angka Kenakalan Pelajar, disebabkan ketidakterdediaan data kenakalan pelajar yang terjadi diluar jam sekolah, kepolisian hanya memiliki data kenakalan yang masuk kategori kriminal.

### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan sebanyak 5 (Lima) Sasaran Strategis dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja utama.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dengan membandingkan antara target dan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya dan target sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Analisis Capaian Sasaran 1  
Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan Dasar)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018	Tahun 2019		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir rpjmd)
			Target	Realisasi			
1	Angka Partisipasi Sekolah jenjang PAUD/ TK		65%	69,64%	107,14%	70,00%	99,48
2	Angka Partisipasi sekolah jenjang Dikdas		100%	100,81%	100,81%	100%	100,81
Rata-rata Capaian					103, 97%		



Berdasarkan tabel diatas capaian indikator dari sasaran Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan Dasar) semuanya berhasil mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 104,00% atau dengan interpretasi sangat baik. Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa daya serap lembaga pendidikan jenjang PAUD/ Dasar terhadap penduduk usia sekolah PAUD/ Dasar mengalami perkembangan yang positif.

Pencapaian target indicator Meningkatnya Partisipasi Pendidikan (PAUD dan Dasar) didukung oleh :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp. 531.600.000,00 dan realisasi Rp. 491.279.946,00 melalui 5 (lima) kegiatan dengan indikator output sebanyak 7 indikator melalui kegiatan di Dinas Pendidikan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 7 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	APBD	
1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah anak usia 5 - 6 thn dari keluarga miskin yg difasilitasi peralatan sekolahnya	orang	500	500
		Jumlah peserta sosialisasi Program PAUD	orang	400	400
2	Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta	Jumlah TK swasta peserta desk penggunaan dana BOP	lembaga	78	78
3	Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD	Jumlah PAUD peserta desk penggunaan dana BOP	lembaga	210	210
4	Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK Pembina	Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya	lembaga	4	4
5	Biaya operasional	Jumlah TK Negeri	lembaga	4	4

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	APBD	
	penyelenggaraan PAUD (DAK)	yang terfasilitasi operasional pendidikannya			
		Jumlah PAUD Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya	lembaga	3	3

Target Indikator output pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tercapai seluruhnya bahkan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini terdapat 1 (satu) output tambahan yaitu jumlah anak usia 5 - 6 thn dari keluarga miskin yg difasilitasi peralatan sekolahnya sebanyak 500 anak.

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan PAUD dan PNF

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 786.675.000,00 dan realisasi Rp. 702.958.100,00 melalui 5 (lima) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 9 indikator, sebanyak 9 indikator tercapai.

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
1	Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah PAUD yang terfasilitasi	Lembaga	60	60
2	Pengembangan model PAUD Holistik Integratif	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan PAUD Holistik Integratif	peserta	50	50
		jumlah PAUD Inklusi yang terfasilitasi	Lembaga	4	4
3	Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD	jumlah terfasilitasinya organisasi mitra PAUD dan PNF	Lembaga	4	4
	Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia	jumlah PAUD yang terfasilitasi	Lembaga	60	60

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
1	Dini				
2	Pengembangan model PAUD Holistik Integratif	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan PAUD Holistik Integratif	peserta	50	50
		jumlah PAUD Inklusi yang terfasilitasi	Lembaga	4	4
3	Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD	jumlah terfasilitasinya organisasi mitra PAUD dan PNF	Lembaga	4	4
4	Penyelegaraan Akreditasi PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya	Lembaga	60	60
		Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi	Lembaga	60	60
5	Penguatan kelembagaan pendidikan non formal	jmlh lembaga yg menjadi peserta sosialisasi akreditasi LKP	lembaga	15	15
		jmlh PKBM peserta sosialisasi kurikulum 13 pendidikan kesetaraan	pkbm	10	10

Terdapat 2 (dua) indikator output pada program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF yang belum mencapai target karena tidak dilaksanakan yaitu Jumlah link and match lulusan PNF dengan perusahaan dan fasilitasi promosi kelembagaan PNF pada masyarakat. Sub Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sebagai gantinya 2 (dua) output tambahan pada kegiatan Penguatan kelembagaan pendidikan non formal yaitu Jumlah lembaga yg menjadi peserta sosialisasi akreditasi LKP sebanyak 15 lembaga dan jumlah PKBM peserta sosialisasi kurikulum 13 pendidikan kesetaraan sebanyak 10 PKBM.

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 22.757.917.000,00 dan realisasi Rp. 22.519.792.789,00 melalui 15 (lima belas) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 53 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 34 indikator telah tercapai dan 19 indikator tidak tercapai.

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
1	Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas PAUD	ruang	7	7
2	Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana PAUD	paket	4	4
3	Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung Sekolah PAUD	Jumlah Peninggian halaman PAUD	pekerjaan	2	2
		Jumlah Pembangunan Kamar Mandi / WC PAUD	Unit	2	2
1	Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas SD	ruang	14	10
2	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI	Jumlah Pembangunan Pagar SD Negeri	pekerjaan	8	8
		Jumlah Peninggian Halaman SD Negeri	pekerjaan	8	8
3	Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs	Jmlh pengadaan komputer smp swasta	Unit	49	49
		Jmlh pengadaan laptop PC smp swasta	Unit	1	1
		Jumlah Pengadaan Mebelair SMP Negeri	set	5	5
		jumlah pengadaan printer ( tambahan )	Unit	2	2
5	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs	Jumlah Pembangunan Kamar Mandi / WC SMP Negeri	Unit	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
		Jumlah Pembangunan Ruang Ketrampilan SMP Negeri	ruang	1	1
		Jumlah Rehab musholla SMP Negeri	ruang	1	1
		Jumlah pengadaan teralis SMP Negeri	ruang	1	0
		Jumlah Pembangunan Pagar SMP Negeri	pekerjaan	2	1
		jumlah pembangunan laboratorium SMP Negeri ( tambahan )	ruang	2	2
		jumlah mebelair SMP Swasta ( tambahan )	set	1	1
		jumlah pavingisasi SMP swasta ( tmabahn )	pekerjaan	1	1
		jumlah rehabilitasi ruang guru SMP negeri ( tambahan )	ruang	1	1
		jumlah rehabilitasi ruang kelas ( tambahan )	ruang	1	1
8	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI	Jumlah Rehab Musholla SD Negeri	Unit	2	2
		Jumlah Rehab Ruang Kelas	ruang	11	15
		Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC	Unit	2	20
		Jumlah Rehab Ruang Penunjang	ruang	2	1
9	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SMP/MTs	Jumlah taman SMP yang dibangun	pekerjaan	1	0
		Jumlah Rehab Musholla SMP Negeri	ruang	1	1
		Jumlah Rehab Ruang Pennjang SMP Negeri	ruang	1	1
		Jumlah Rehab Laboratorium	ruang	2	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
		SMP Negeri			
		Jumlah Rehab Pagar SMP Negeri	pekerjaan	1	1
11	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)	Jumlah Rehab Ruang Penunjang	ruang	2	3
		Jumlah Rehab Ruang Kelas	ruang	81	81
		Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	ruang	0	0
		Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC	Unit	48	51
12	Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)	Jumlah Rehab Ruang Kelas SMP	ruang	11	4
		Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	ruang	4	2
		Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC SMP	Unit	36	9
13	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI (Bantuan Provinsi)	Jumlah ruang kelas yang direhab	ruang	6	4
15	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI (Bantuan Provinsi)	Jumlah kelengkapan alat TIK pembelajaran yang diadakan	Unit	15	15
		Jumlah laptop yang diadakan	Unit	76	72
		Jumlah printer yang diadakan	Unit	3	3
		Jumlah LCD yang diadakan	Unit	41	39
		Jumlah laptop yang diadakan	Unit	50	30
		Jumlah printer yang diadakan	Unit	10	6
		Jumlah LCD yang diadakan	Unit	40	24

Dari tabel di atas dapat dilihat sebanyak 22 target indikator output tercapai, 4 indikator output melebihi target dan sebanyak 17 target indikator output yang tidak tercapai akibat adanya kesalahan penginputan indikator maupun target indikator ke dalam aplikasi e-simral, adanya sekolah yang menerima bantuan dari dua sumber yang berbeda sehingga harus memilih salah satunya, dan adanya alokasi bantuan provinsi pada APBD perubahan 2019 yang ditetapkan di akhir tahun 2019 sehingga tidak cukup waktu untuk dilaksanakan 100%. Pada Kegiatan Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs terdapat 3 output tambahan berupa komputer 49 unit, laptop 1 unit, printer 1 unit. Kegiatan Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs ada tambahan output yaitu pembangunan laboratorium sebanyak 2 ruang, rehab ruang guru 1 ruang, rehab ruang kelas 1 ruang, pavingisasi 1 pekerjaan, pengadaan mebel 1 set.

#### 4. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 28.750.539.000,00 dan realisasi Rp. 27.334.314.523,00 melalui 6 (enam) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir tahun 2019, 8 indikator tercapai, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
1	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	jumlah SD negeri swasta penerima dana BOS	Sekolah	102	102
		jumlah SMP negeri swasta penerima dana BOS	sekolah	28	28
2	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Jumlah SD penerima dana BOS	sekolah	71	71
3	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Jumlah SMP penerima dana BOS	sekolah	17	17
4	Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar	Jumlah sekolah peserta PPDB Online	sekolah	30	30

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
5	Fasilitasi Operasional Pendidikan SD	Jumlah SD negeri penerima dana FOP	SDN	71	71
		Jumlah peserta pelatihan batik	siswa	3.000	3.000
6	Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP	Jumlah SMP negeri penerima dana FOP	SMPN	17	17

Target indikator output pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tercapai seluruhnya dan bahkan pada kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdapat 2 (dua) output tambahan yaitu jumlah SD negeri swasta penerima dana BOS dan jumlah SMP negeri swasta penerima dana BOS yang tercapai juga targetnya 102 SD dan 28 SMP.

#### Analisis Capaian Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pendidikan (dasar, anak usia dini dan PNF)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018	Tahun 2019		% Capaian	Target Akhir Renstr a	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ targer akhir rpjmd)
			Target	Realisasi			
1.	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berakreditasi A	-	75%	68,45%	91,27%	85%	80,53%
2.	Persentase Penyelenggaraan PAUD berakreditasi A	-	3,50%	9,09%	259,71%	5,50%	165,27%
Rata-rata Capaian					175,49%		

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan PNF) memiliki 2 (dua) Indikator dari sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan PNF) hanya satu Indikator kinerja yang berhasil melebihi target, namun rata-rata capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan PNF) sebesar 175,49% atau dengan interpretasi sangat baik.

Pencapaian target indikator Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pendidikan (Dasar, Anak Usia Dini dan PNF) didukung oleh :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	APBD	
1	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah kegiatan sosialisasi akreditasi	kegiatan	1	1
		Jumlah kegiatan pemantapan hasil akreditasi	kegiatan	1	1
		Jumlah kegiatan monitoring akreditasi	kegiatan	1	1
2	Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP	Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi try out yang difasilitasi	kegiatan	1	1
		Jumlah kegiatan penyusunan soal try out yang difasilitasi	kegiatan	1	1
		Jumlah kegiatan try out yang difasilitasi	kegiatan	1	1
		Jumlah kegiatan koreksi LJK try out	kegiatan	1	1
3	Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta)	Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1
		Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1
		Jumlah kegiatan pemindaian LJK US yang difasilitasi	kegiatan	1	1
		Jumlah SD/MI penyelenggara US yang difasilitasi	SD/MI	146	146
4	Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta)	Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1
		Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1
		Jumlah SMP/MTs penyelenggara US yang	SMP/MTs	37	37

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	APBD	
		difasilitasi			
5	Penyelenggaraan UN dan US	Jumlah kegiatan UN dan UNPK yang difasilitasi	kegiatan	1	1
6	Optimalisasi komite sekolah	Jumlah sekolah peserta sosialisasi optimalisasi peran komite sekolah	sekolah	214	88

Berdasarkan tabel di atas Indikator kegiatan optimalisasi komite sekolah tidak mencapai target karena mempertimbangkan efektifitas kegiatan sehingga diputuskan untuk mengurangi jumlah peserta hanya dari sekolah negeri.

## 2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 18.573.222.000,00 dan realisasi Rp. 18.219.100.400,00 melalui 13 (tiga belas) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 27 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 27 indikator tercapai, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	APBD	
1	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pelaksanaan desk pendataan & pemetaan PTK	kegiatan	2	2
		Jumlah dokumen bezetting PTK yang tersusun	dokumen	1	1
2	Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT	Jumlah SMP/MTs swasta penerima bantuan Jasa Kinerja	SMP/MTs	20	20
		Jumlah SD/MI swasta penerima bantuan Jasa Kinerja	SD/MI	76	76
		jumlah PTK Non PNS penerima bantuan Harlindung	orang	1.870	1.880
3	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah pencetakan jurnal	eksemplar	500	500

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	APBD	
	Profesi Guru	kependidikan			
		Jumlah peserta sosialisasi jurnal kependidikan	orang	150	150
		Jumlah penerima bantuan bimbingan PTK/ PTBK	orang	15	15
4	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah PTK PNS Dan Non PNS Penerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S 2	orang	3	3
		Jumlah PTK PNS Dan Non PNS Penerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S 1	orang	130	130
5	Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah	Jumlah kegiatan bintek peningkatan kualitas penerapan MBS di sekolah yang diadakan	kegiatan	1	1
6	Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan	Jumlah bulan fasilitasi PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan	bulan	12	12
7	Fasilitasi pemberdayaan organisasi / Kelompok PTK	Jumlah kegiatan fasilitasi MGMP mapel PAI dan PKN (pendidikan karakter) yang diselenggarakan	kegiatan	1	1
		Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang terfasilitasi	Kelompok	3	3
8	Fasilitasi seleksi calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik	Jumlah kegiatan seleksi calon kepala sekolah/ pengawas/penilik	kegiatan	3	3
9	Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Peserta Bintek PTK	orang	100	100
		Jumlah Bimtek PTK yang diadakan	bimtek	2	2
10	Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan	cabang lomba	8	8
		jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang	cabang lomba	8	8

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	APBD	
		diikuti			
11	Penilaian kinerja kepala sekolah dan induksi guru pemula	Jumlah peserta sosialisasi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	orang	50	50
		Jumlah peserta Pembekalan Induksi Guru Pemula	orang	151	151
12	Penyelenggaraan pembinaan disiplin PTK PNS	Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK	orang	107	107
13	Pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan sertifikasi pendidik	kegiatan	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi dapodik	kegiatan	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi pencairan TPG	kegiatan	1	1
		Jumlah pelaksanaan kegiatan desk sertifikasi	kegiatan	2	2

Pelaksanaan kegiatan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan berhasil dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada target indikator output yang tercapai.

Pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021. Kegiatan yang menonjol dan mendukung tercapainya indikator program adalah Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan GTT/PTT.

Sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Perlindungan (Harlindung) Tahun 2019, bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Pekalongan perlu diberikan Bantuan Penghargaan dan Perlindungan kepada bukan

PNS dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Kemenag. Pemberian Harlindung dan Jaskin memberikan dampak positif terhadap kinerja PTK non PNS dalam memberikan pelayanan pendidikan dan membantu peningkatan mutu sekolah. Penerima Bantuan Harlindung pada tahun 2019 terealisasi sejumlah 1880 orang. Jumlah penerima Bantuan Penghargaan dan Perlindungan (Harlindung) dapat berubah dikarenakan Tenaga Kependidikan yang resign, meninggal dunia dan melebihi batas usia.

Dibawah ini adalah Foto Kegiatan Sosialisasi Pemberian Bantuan Penghargaan dan Perlindungan bagi PTK Tahun 2019.



### 3. Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 136.000.000,00 dan realisasi Rp. 123.068.750,00 melalui 3 (tiga) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 indikator telah tercapai dan 1 indikator belum tercapai

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	APBD	
1	Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD	Jumlah SD penyedia layanan inklusi yang terfasilitasi	SD	4	4
2	Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP	jumlah SMP penyedia layanan inklusi yang terfasilitasi	SMP	2	1
3	Fasilitasi penyediaan	Jumlah siswa miskin di	persen	2	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	APBD	
	beasiswa bagi siswa tidak mampu dan atau berprestasi	SD/MI yang belum masuk PIP yang mendapat beasiswa			
		Jumlah siswa miskin di SMP/MTs yang belum masuk PIP yg mendapat beasiswa	persen	2	0

Capaian Output jumlah SMP penyedia layanan Inklusi yang terfasilitasi belum mencapai target yaitu 1 sekolah dari 2 (dua) sekolah yang ditargetkan. Hal tersebut disebabkan belum selesainya proses perencanaan kebutuhan untuk sekolah penyedia layanan antara lain tenaga pengajar dan kesiapan sarana prasarannya. Direncanakan pada tahun 2020 target tersebut bisa terwujud.

Terdapat 2 (dua) output tambahan pada Kegiatan Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan atau berprestasi yaitu jumlah siswa berprestasi jenjang dikdas penerima beasiswa sebanyak 3 orang dan jumlah dokumen daftar penerima beasiswa jenjang dikmen sebanyak 1 dokumen. Sedangkan untuk indikator Jumlah siswa miskin di SD/MI yang belum masuk PIP yang mendapat beasiswa dan Jumlah siswa miskin di SMP/MTs yang belum masuk PIP yg mendapat beasiswa tidak ada karena walaupun sudah menjadi target SPM tahun 2018 akan tetapi belum menjadi prioritas. Selain hal tersebut juga biaya pendidikan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs seharusnya sudah digratiskan karena pemerintah kota Pekalongan melalui dinas Pendidikan sudah menyalurkan dana Fasilitasi operasional Sekolah (FOP) bagi sekolah negeri dan dana Jasa Kinerja (Jaskin) bagi sekolah swasta. Penyaluran dana jasa kinerja (Jaskin) kepada sekolah swasta disertai keharusan bagi sekolah tersebut untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin.

#### 4. Program Pendidikan Non Formal

Secara umum program Pendidikan Non Formal dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 786.675.000,00 dan realisasi Rp. 702.958.100,00 melalui 5 (lima) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 9 indikator, sebanyak 9 indikator tercapai, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
1	Pengembangan pendidikan keaksaraan	jumlah penduduk buta aksara dasar yg mendapatkan fasilitas pembelajarannya	Warga belajar	162	162
		jumlah penduduk buta aksara lanjutan dan fasilitasi life skill	warga belajar	50	50
2	Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan	Jumlah lembaga yang melaksanakan ujian kesetaraan sekolah	kegiatan	17	17
		Jumlah mata pelajaran ujian yang berkualitas	mata pelajaran	13	13
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C	jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A,B,C	siswa	1.600	1.600
		terciptanya data warga belajar yang valid	dokumen	1	1
4	Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah	jumlah anak putus sekolah yang didampingi agar kembali ke sekolah	anak	50	50
		jumlah Pendampingan anak putus sekolah mendapatkan fasilitasi pendidikan lainnya	anak	50	50
5	Try out ujian nasional pendidikan kesetaraan	Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti ujicoba UNPK	lembaga	17	17

Target Indikator output pada program Pendidikan Non Formal tercapai seluruhnya dan bahkan pada kegiatan Pengembangan pendidikan keaksaraan terdapat

1 (satu) ouput tambahan yaitu jumlah penduduk buta aksara dasar yg mendapatkan fasilitas pembelajarannya sebanyak 162 warga belajar.

**Analisis Capaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter**  
**di sekolah**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018	Tahun 2019		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ targer akhir rpjmd)
			Target	Realisasi			
1	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah		100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah		10%	67,34%	673,4%	30%	224,47
3	Angka Kenakalan Pelajar		4	na	na	2	Na
Rata-rata Capaian					257,80%		

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk indicator kedua Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah, berhasil mencapai target. Sedangkan indikator Angka kenakalan pelajar dengan target tahun 2019 sejumlah 4 siswa/ 100 siswa tidak bisa disajikan datanya. Ketidakterediaan data karena biasanya kenakalan pelajar terjadi di luar jam sekolah sehingga pihak sekolah tidak memiliki data tersebut.

Pencapaian target indicator Meningkatnya implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah didukung oleh :

1. Program Pembentukan Karakter anak

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 800.000.000,00 dan realisasi Rp. 788.176.784,00 melalui 4 (empat) Kegiatan,

dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 8 indikator telah tercapai, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
1	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	jumlah PAUD yang menerapkan Kurikulum	Lembaga	25	25
2	Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD	jumlah lomba gebyar kreasi anak	lomba	10	10
		lomba sekolah sehat	Lembaga	4	4
		jumlah lomba gugus paud	gugus	4	4
3	Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD	Jumlah penerapan model karakter perwal ke lembaga	lembaga	50	0
		buku panduan paud	juklak	1	0
4	Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD	fasilitasi lomba tingkat provinsi pendidik berprestasi	orang	4	4
		fasilitasi lomba tingkat provinsi organisasi mitra	organisasi mitra	1	1

Indikator Jumlah penerapan model karakter perwal ke lembaga dan Buku panduan PAUD tidak mencapai target karena Penyusunan Perwal tentang model pendidikan karakter masih dalam proses sehingga belum bisa diterapkan. Akan tetapi terdapat 2 (dua) output tambahan pada kegiatan Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD yaitu jumlah sekolah yang terfasilitasi layanan konseling pendidikan (#LAKON\_DIK) sebanyak 92 sekolah dan jumlah sekolah yang menerapkan model sekolah sahabat keluarga sebanyak 4 TK Negeri.

Sejak diresmikan oleh wakil Walikota Pekalongan pada awal bulan Mei tahun 2019, #LAKON-DIK memiliki empat orang konselor fungsional dan dua konselor yang menjabat struktural. Dengan kapasitas enam orang ini, Kepala

Dinas Pendidikan yakin bisa maksimal memberikan layanan konseling dan dalam membantu sekolah, orang tua, dan anak didik menyelesaikan masalah. permasalahan pendidikan saat ini sangat kompleks, dengan dilaunchingnya Lakon\_dik ini permasalahan yang belum tuntas di sekolah dapat diselidiki penyebabnya agar ke depannya tak menyebabkan dampak psikologis bagi anak didik. Untuk mendapatkan peayanan konseling, sekolah atau masyarakat bisa datang ke #LAKON-DIK dan sebaliknya kami datang ke sekolah atau masyarakat untuk memberikan konseling. Kedepannya Dinas Pendidikan Kota Pekalongan akan segera melengkapi nomor telepon yang dapat dihubungi untuk layanan koseling untuk lembaga pendidikan dan masyarakat umum.

## 2. Program Pembentukan Karakter Siswa

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 3.582.165.000,00 dan realisasi Rp. 3.507.939.387,00 melalui 5 (lima) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 9 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 9 indikator telah tercapai, sebagai berikut :

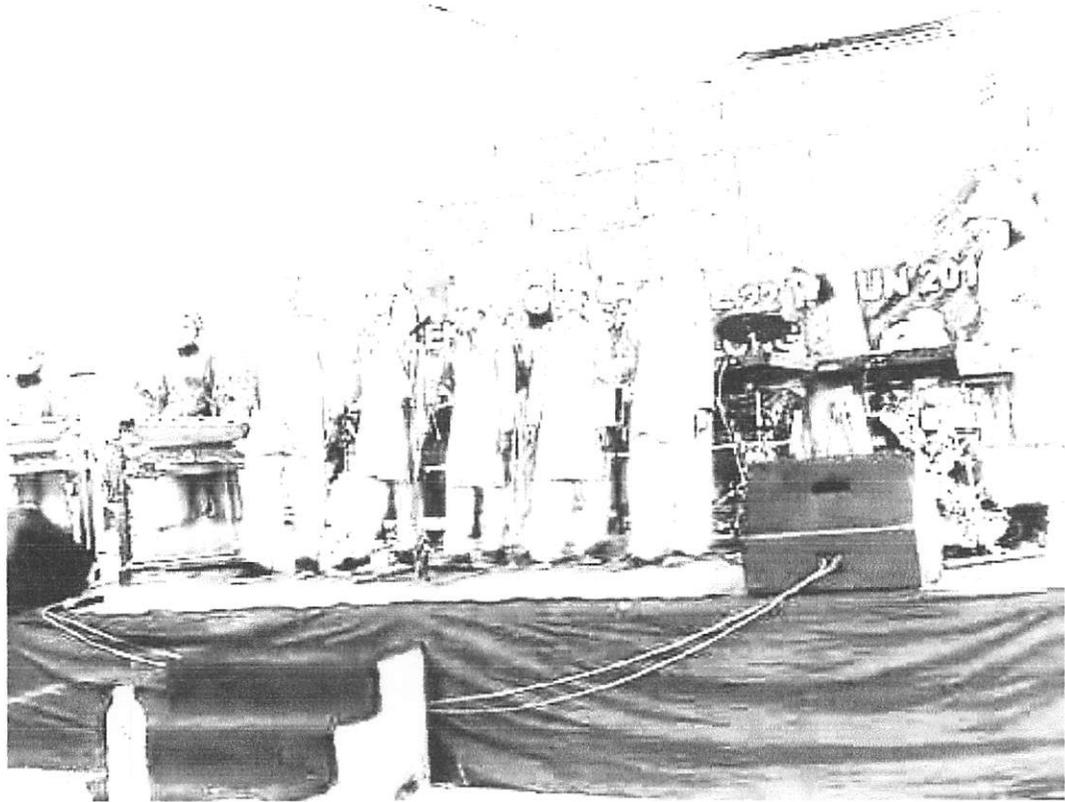
No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			Satuan	Angka	
1	Peningkatan Pembelajaran BTQ	Jumlah Siswa SD/MI yang berijazah BTQ	Orang	3.100	3.100
		jumlah penerima bantuan transport	orang	1.200	1200
2	Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan peralatan batik	buah	4	4
3	Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni	Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yang difasilitasi	jenis kompetisi	5	5
		Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kota yang difasilitasi	jenis kompetisi	5	5
4	Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Siswa Dikdas	Fasilitasi lomba tingkat propinsi organisasi mitra	jenis kompetisi	5	5

		Fasilitasi lomba tingkat propinsi peserta berprestasi	jenis kompetisi	5	5
5	Fasilitasi kegiatan kepramukaan	Jumlah lomba dalam kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan	lomba	7	7
		Jumlah lomba dalam kegiatan pesta siaga tingkat kota	lomba	7	7

Berikut ini adalah dokumentasi dari berbagai macam kegiatan lomba dan kompetisi yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan pada tahun 2019.



Penampilan salah satu peserta Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat SMP



Penampilan Grup Rebana SD Negeri Poncol 01 dalam Lomba MAPSI tahun 2019

Analisis Capaian Sasaran 4  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018	Tahun 2019		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi			
1	Nilai Evaluasi AKIP	-	72,5	72,61	100,15%	77,5	93,69%
Rata-rata Capaian							

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Evaluasi AKIP berhasil melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel diatas target indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP tahun 2019 sebesar 72,5 dan berhasil terealisasi sebesar 72,61 sehingga capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100,15% dari target ditetapkan.

Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2019 berhasil melebihi target dan mendapat predikat sangat baik.

Pencapaian target indikator Nilai Evaluasi AKIP didukung oleh :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Realisasi 2019
			Satuan	Angka	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12
5	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	12
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	11	11

11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasnya koordinasi dan konsultasi luar daerah	Org/k ali	443	443
----	--	---	-----------	-----	-----

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	4	4
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	48	48
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan printer	unit	3	3
		Jumlah pengadaan LED SMART 70"	unit	1	1
		Jumlah pengadaan power amplifier outdoor 600w	unit	1	1
		Jumlah pengadaan speaker outdoor, penyangga type tripod	unit	4	4
		Jumlah pengadaan mixer audio 12 channel	unit	1	1
		Jumlah pengadaan DVD Player	unit	1	1
		Jumlah pengadaan clipon mic wireless	unit	1	1
		Jumlah pengadaan laptop corei5	unit	5	5
		Jumlah pengadaan dispenser	unit	2	2
		Jumlah pengadaan AC floor standing	unit	1	1
		Jumlah pengadaan ac split, 2 pk	unit	2	2
		Jumlah pengadaan tabung pemadam kebakaran	unit	1	1
		Jumlah pengadaan mesin penghancur kertas	unit	2	2
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung	Bulan	12	12

	gedung kantor	kantor			
--	---------------	--------	--	--	--

### 3. Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian kinerja dan 11 keuangan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Realisasi 2019
			Satuan	Angka	
1	Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja	Persen	100	100
2	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun	dokumen	6	6
3	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	dokumen	3	3
4	Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan	dokumen	1	1
5	Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah dan Provinsi	Jumlah kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan yang dikelola	Laporan	92	792

### 4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 958.436.000,00 dan realisasi Rp. 940.748.000,00 melalui 8 (delapan) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 8 indikator telah tercapai sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
1	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan	Jumlah aplikasi APBS yang dikembangkan	aplikasi	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Capaian 2019
			satuan	Angka	
	dana pembantuan				
2	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data	aplikasi	1	1
3	Penerbitan Tabloid Pendidikan	Jumlah penerbitan Majalah Pendidikan	edisi	2	2
4	Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan	Jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan	kegiatan	2	2
5	Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik)	Jumlah sekolah yang terfasilitasi pendataan pendidikan	sekolah	389	389
6	Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) (Bantuan Provinsi)	jumlah sekolah yang terfasilitasi pendataan profilnya	sekolah	189	189
7	Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayanan Pendidikan dasar	Jumlah kegiatan Penghitungan capaian SPM yang difasilitasi	kegiatan	1	1
8	Fasilitasi penyusunan APBS	Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi dalam menyusun APBS	sekolah	128	128

Target Indikator output pada program Manajemen Pelayanan Pendidikan tercapai seluruhnya dan bahkan terdapat 1 (satu) output tambahan dikarenakan adanya kegiatan Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) (Bantuan Provinsi) bersumber dari APBD Provinsi yaitu jumlah sekolah yang terfasilitasi pendataan profilnya sebanyak 189 sekolah.

**Analisis Capaian Sasaran 5**  
**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018	Tahun 2019		% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Terhadap Target Akhir (realisasi/ target akhir rpjmd)
			Target	Realisasi			
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	800	1000	125%	90	111,11%
Rata-rata Capaian					125%		

Berdasarkan tabel diatas target indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 sebesar 800 dan berhasil terealisasi sebesar 1000 sehingga capaian kinerja tahun 2019 sebesar 125% dari target ditetapkan.

Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2019 berhasil melebihi target dan mendapat predikat sangat informatif.

Keberhasilan Dinas Pendidikan mendapatkan predikat sangat informatif disebabkan diantaranya Dinas Pendidikan sudah secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan segala informasisemua kegiatan yang sifatnya internal maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat, sehingga sudah tidak ada lagi informasi yang terlambat tersampaikan kepada masyarakat dikarenakan kendala-kendala yang bersifat teknis.

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

**1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019		Realisasi 2019
			Satuan	Angka	
1	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik	Kegiatan	3	3

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan 8 (Delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan persentase nilai capaian 103,97% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan presentase nilai capaian 175,49% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan presentase nilai capaian 257,80% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan presentase nilai capaian 100,25% atau interpretasi sangat baik.

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan presentase nilai capaian 125% atau interpretasi sangat baik.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (Lima) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 243.503.365.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 228.406.615.720,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,8%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 15.096.749.280,- yang merupakan Silpa Belanja Tidak Langsung yaitu Rp. 2.387.916.302,- dan Silpa Belanja Langsung Rp. 12.708.832.978,-.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKALONGAN

  
Drs. SOEROSO, M.Pd.  
Pembina Tk. I  
NIP.19640921 198803 1 007